KANTOR KOMUNIKASI UNIVERSITAS INDONESIA

KLIPING

KLASIFIKASI : Universitas Indonesia
TEMA : Dukong Penempatan TKI Suami Istri
SURAT KABAR/MAJALAH : Indopos

Hari **Kamis** Tanggal **17** Bulan **Januari** Tahun **2013** Halaman **7** Kolom **6-7**

RINGKASAN :

UKM Center UI menggelar acara Migrant Worker Award 2012 pada Kamis (17/1) di Auditorium terapung Perpustakaan Pusat UI. Dalam acara tersebut, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) M. Jumhur Hidayat mendukung penempatan TKI suami istri pada majikan yang sama di luar negeri sebagai upaya meminimalisasi permasalahan khususnya para TKI yang bekerja sebagai Penata laksana Rumah Tangga (PLRT).

CATATAN :

--

8

Dukung Penempatan TKI Suami Istri

DEPOK - Penempatan TKI pasangan suami istri pada majikan yang sama di luar negeri merupakan upaya ideal karena dapat meminimalisasi permasalahan khususnya TKI yang bekerja pada sektor Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT).

"Saya mendukung adanya pemikiran maupun kesimpulan berupa rekomendasi terkait penempatan TKI suami istri, sebagaimana disampaikan oleh Kustini dalam disertasi doktorinya," ujar Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) M Jumhur Hidayat kepada wartawan di Auditorium Juwono Sudarsono Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/1).

Jumhur menyampaikan, hal itu sesuai mengikuti acara promosi doktor Kustini dengan disertasi berjudul, "Strategi Pengasuhan Anak Pada Keluarga Buruh Migran Perempuan Sukabumi." Kustini adalah Kepala Bidang Litbang Aliran dan Pelayanan Keagamaan pada Puslitbang Kementerian Agama.

Dalam disertasinya itu Kustini meneliti 13 keluarga TKI Perempuan di Desa Sukawangi, Keca-

matan Cibatu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang menjadi TKI PLRT di Mekah dan Jeddah, Arab Saudi. Menurut Kustini, upaya pengasuhan anak TKI yang orangtuanya bekerja di luar negeri jelas memerlukan strategi bersama dari komunitas keluarga masing-masing TKI.

Pada bagian lain, Jumhur menyatakan, rekomendasi dari Kustini tersebut bagian dari suara rakyat, karenanya pemerintah perlu mengapresiasi keinginan rakyat yang ditekankan oleh penelitian Kustini.

Jumhur mengaku, siapa pun termasuk pemerintah tidak bisa melarang warganya untuk menjadi TKI di luar negeri. Apalagi, bekerja merupakan hak setiap orang yang dilindungi UU.

"Adapun penempatan TKI pasangan suami istri sudah umum terjadi di sejumlah negara tujuan kawasan Timur Tengah. Lebih lagi pada TKI sektor informal PLRT dengan didampingi para suami yang bekerja sebagai supir pribadi, penjaga kebun rumah majikan, atau bertugas memelihara keamanan tempat penyimpanan barang (gudang) yang dimiliki keluarga majikan," ungkapnya. (cdl)

8